

**PENGARUH BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TERHADAP DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN
2010-2012**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Maria Emilia Yusta Tuke

12.10.0795

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana

Yogyakarta

2014

SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TERHADAP DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN
2010-2012**

Diajukan Kepada Fakultas Bisnis

Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

MARIA EMILIA YUSTA TUKE

12.10.0795

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010-2012**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

MARIA EMILIA YUSTA TUKE

12.10.0795

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi pada 19 September 2014

Dewan Penguji :

1. Astuti Yuli Setyani, SE, M.Si. Ak;

(Ketua Tim)

2. Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt.

(Dosen Penguji I)

3. Dra. Xaveria Indri Prasasiyaningsih, M.Si

(Dosen Penguji II)

Yogyakarta, 23 SEP 2014

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Singgih Santoso, M.M

Ketua Program Studi Akuntansi

Dra. Putriana Kristanti, MM., AK

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul :

**“PENGARUH BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010-2012”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yaitu pencabutan gelar sarjana saya.



MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”.

(Roma 12:12)

“WHEN THERE IS GOD, THERE IS ALWAYS A WAY”

“In the name of The Father, and The Son, and The Holy Spirit, Amen”

©UKDWN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Jesus Christ , thankyou for blessing me. Im Your blessed daughter.
- Bapak, Mama, Cory, Obi, Ryan, Tiwe terima kasih atas dukungannya selama ini dan yang selalu menyertakan nama anakmu dalam setiap doa
- Om Ba, Mama Asa, Mama Pulo terimakasih untuk doa dan semangat yang tak pernah putus-putusnya untuk anakmu ini
- Rista, Yesika, Tina, Fifi, Pipi, Bitos, Kak Sin, Tari, Vivi, Dyah, Mega, Kak Redy thanks for being my bestfriend. Our friendship has grown along with us ..
- Teman-teman Angkatan 2010 , terima kasih untuk kebersamaan yang kita lewati di Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mba Wahyu, Mba Ditha, Mba Fika, Kak Alem, terima kasih untuk semua kegilaan yang kita alami selama hidup bersama sebagai keluarga baru di kost Klitern Lor - YK
- Universitas Kristen Duta Wacana dan semua isinya yang menjadi saksi perjuangan saya selama menempuh perkuliahan, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas BerkatNya yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pengaruh Belanja Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010-2012”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu di Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Putriana Kristanti, Dra., MM., Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
2. Ibu Christine Novita Dewi, SE, Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
4. Kedua Orang Tua tercinta (Antonius Tuke & Pala Florida) yang penulis sayangi, penulis menghaturkan sembah sujud sebagai ucapan terima kasih yang tentunya penulis belum mampu membalas pengorbanan bapak dan mama yang telah membesarkan, mendidik, dan akan selalu memberikan doa restu, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran penlis dalam segala hal.
5. Om Ba, Mama Asa, Mama Pulo yang telah selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis
6. Kakak serta Adik (Cory, Obi, Ryan, Tiwe) yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
7. Teman-teman Akuntansi angkatan 2010, Yesika Fajar Widiandaru, SE, Rista C. Astianto, SE, Meylin L. Purba, SE, Vivi Christiani, SE, Levinda D. Ngabalin, SE, Lestari Suryaningsih, SE, Dyah Praningtyas Paut, SE dan seluruh teman-teman yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan serta perjuangan selama perkuliahan. Sukses selalu untuk kita semua teman-teman

8. Bapak, Ibu dan teman-teman part timer (Mika, Nopri, Agung, Ginting) di Perpustakaan Universitas Kristen Duta Wacana terima kasih atas kerja samanya selama ini, dan sukses terus
9. Teman-teman Kost Klitren Lor Gk 321, mba wahyu, mba dita, mba fika, kak alem yang selalu menjadi sahabat, saudara, teman curhat bagi penulis dikala senang, sedih, galau dan kejadian-kejadian yang terjadi diwaktu lampau mengajarkan untuk selalu ikhlas dan tabah dalam menjalani sesuatu. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian selama ini.
10. Bapak dan Ibu Badan Pusat Statistik daerah Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih atas bantuan datanya.
11. *Especially thanks for* Rista, Mega, Tina, Pipi, Fini, Bitos, dan Kak Sin, kak Redy yang membantu penulis dalam segala hal, terima kasih sebanyak-banyaknya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik dalam tindakan maupun doa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2014

Penulis

Maria Emilia Yusta Tuke

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keterbatasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah.....	11
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	11
2.2 Dana Perimbangan	13
2.2.1 Pengertian Dana Bagi Hasil	13
2.2.2 Pengertian Dana Alokasi Umum	14
2.2.3 Pengertian Dana Alokasi Khusus.....	15
2.3 Belanja Daerah.....	16
2.3.1 Pengertian Belanja Daerah.....	16
2.3.1.1 Belanja Langsung.....	16
2.3.1.2 Belanja Tidak Langsung	17
2.4 Kerangka Pemikiran.....	19
2.4.1 Penelitian Terdahulu	20
2.4.2 Hipotesis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Umum.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data	24
3.2 Populasi dan Sampel.....	24
3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran	25
3.4 Teknik Analisis Data.....	26
3.5 Alat Analisis	26
3.5.1 Analisis Deskriptif	26
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	27
3.5.3 Regresi Sederhana.....	28
3.5.4 Uji Parameter Individual (uji statistik t)	28

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif	29
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	30
4.2.1 Uji Normalitas.....	31
4.2.2 Uji Autokorelasi.....	31
4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	32
4.2.4 Analisis Regresi Sederhana.....	32
4.2.5 Uji Parameter Individual (uji statistik t)	33
4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	34

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	39
5.2 Keterbatasan dan Saran.....	39
5.2.1 Keterbatasan.....	39
5.2.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PAD tahun 2010-2012 daerah otonomi baru Provinsi NTT	5
Tabel 1.2 Pertumbuhan PAD 2010-2012 & 2011-2012	5
Tabel 1.3 DAU tahun 2010-2012 daerah otonomi baru Provinsi NTT	6
Tabel 1.4 Pertumbuhan DAU 2010-2011 & 2011-2012.....	6
Tabel 1.5 Belanja Daerah tahun 2010-2012 daerah otonomi baru Provinsi NTT	8
Tabel 1.6 Pertumbuhan Belanja Daerah 2010-2011 & 2011-2012.....	8
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif.....	29
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	31
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	31
Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	32
Tabel 4.5 Hasil Persamaan Regresi	32
Tabel 4.6 Hasil Uji t.....	33
Tabel 4.7 Isu yang terjadi di NTT.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	20
-----------------------------------	----

©UKDW

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif	43
Lampiran 2. Hasil Uji Normalitas.....	43
Lampiran 3. Hasil Uji Autokorelasi.....	43
Lampiran 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi	44
Lampiran 5. Hasil Uji t	44
Lampiran 6. Data Realisasi Belanja Daerah dan DAU Anggaran APBD	45
Lampiran 7. Data Realiasi DAU dalam Anggaran	46
Lampiran 8. Daftar Pertumbuhan DAU	46
Lampiran 9. Data Realiasi PAD dalam Anggaran	47
Lampiran 10. Daftar Pertumbuhan PAD	47
Lampiran 11. Data Realisasi Belanja Daerah Anggaran APBD	48
Lampiran 12. Daftar Pertumbuhan Belanja Daerah.....	48

PENGARUH BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010-2012

Maria Emilia Yusta Tuke

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis Universitas Duta Wacana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis belanja daerah berpengaruh terhadap dana alokasi umum. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan 24 sampel yang terdaftar dalam Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan 2 uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas dan Uji Autokorelasi, karena dalam penelitian hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan regresi sederhana dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja berpengaruh terhadap dana alokasi umum.

Kata kunci : Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum

PENGARUH BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010-2012

Maria Emilia Yusta Tuke

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis Universitas Duta Wacana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis belanja daerah berpengaruh terhadap dana alokasi umum. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan 24 sampel yang terdaftar dalam Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan 2 uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas dan Uji Autokorelasi, karena dalam penelitian hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan regresi sederhana dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja berpengaruh terhadap dana alokasi umum.

Kata kunci : Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi di Indonesia, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan struktur pemerintahan yang tersentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dasar-dasar otonomi daerah yang dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabel, dan partisipasi dari masyarakat, artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab, dan proporsional dalam mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Menurut UU No.32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak

eksekutif (Pemerintah daerah) dan Pihak legislatif (DPRD), pihak eksekutif berperan sebagai pelaksana operasional daerah yang berkewajiban membuat anggaran APBD, sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Dengan disahkannya RAPBD menjadi APBD, berarti DPR telah memberi kuasa sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakannya sebagaimana tertuang dalam APBD tersebut. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan anggaran (pembiayaan defisit) yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. APBD dalam satu tahun anggaran hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran APBD, pihak pemerintah daerah perlu melakukannya secara inovatif dan kreatif agar berbagai sumber dana yang ada dapat dialokasikan secara tepat sasaran untuk membangun fasilitas publik.

Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Komposisi belanja merupakan upaya logis yang

dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, hal ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja yang merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tapi dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari PAD semata tetapi berasal dari pemerintah pusat yang disebut dengan Dana Perimbangan.

Dana perimbangan selain digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan daerah juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah (kawedar, dkk 2008). Namun kenyataannya dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah justru malah menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat selaku pemberi dana, hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama otonomi daerah yakni memajukan perekonomian daerah. Dana perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana

Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa besaran keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto. Dampak kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap besarnya kesenjangan kemampuan antar daerah, khususnya karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Dengan kata lain, daerah yang mempunyai potensi sumber daya dalam pendapatan asli daerahnya tinggi maka seharusnya membutuhkan dana DAU yang relatif kecil, sebaliknya, apabila daerah yang mempunyai sumber potensi pendapatan asli daerah yang kecil seharusnya mendapat dana DAU yang relatif besar. Namun faktanya yang terjadi pada Pemerintahan di Kab/Kota Propinsi NTT bertolak belakang dengan pernyataan diatas hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 PAD tahun 2010-2012 daerah otonomi baru Prop. NTT
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2010	2011	2012
Lembata	14.065	17,559	21,284
Rote Ndao	12,752	16,447	16,067
Manggarai Barat	17,441	21,966	25,752
Nagekeo	10,350	15,962	16,758
Sumba Barat Daya	11,835	14,253	17,746
Sumba Tengah	10,909	14,054	13,180
Manggarai Timur	8,484	12,868	15,267
Sabu Raiju	1,482	5,451	9,317

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 1.2 Pertumbuhan PAD 2010-2011 & 2011-2012 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2010-2011	2011-2012
Lembata	25	21
Manggarai Timur	52	19
Manggarai Barat	26	17
Nagekeo	54	5
RoteNdao	29	-2
Sumba Barat Daya	20	25
Sumba Tengah	29	-6
Sabu Raiju	268	71

Tabel 1.3 DAU tahun 2010-2012 daerah otonomi baru Prop. NTT
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2010	2011	2012
Lembata	235,658	263,397	314,177
Rote Ndao	213,544	236,219	284,550
Manggarai Barat	254,250	286,782	342,639
Nagekeo	223,481	250,899	303,787
Sumba Barat Daya	238,819	277,392	321,654
Sumba Tengah	181,653	207,643	239,757
Manggarai Timur	255,081	293,409	339,701
Sabu Raiju	64,261	195,864	220,235

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 1.4 Pertumbuhan DAU 2010-2011 & 2011-2012 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2010-2011	2011-2012
Lembata	12	19
Manggarai Timur	15	16
Manggarai Barat	13	19
Nagekeo	12	21
RoteNdao	11	20
Sumba Barat Daya	16	16
Sumba Tengah	14	15
Sabu Raiju	205	12

Pada kedua tabel diatas, menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi dana DAU yang dianggarkan. Hal ini terjadi karena sebagian dana dari pemerintah pusat digunakan untuk membelanjai kebutuhan pemerintah daerah yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik dan melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam struktur APBD belanja daerah dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, 2. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Hal ini diduga disebabkan oleh realisasi belanja yang tinggi dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Belanja Daerah tahun 2010-2012 daerah otonomi baru Prop. NTT
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2010	2011	2012
Lembata	326.393	391.257	424.407
Rote Ndao	327.720	368.207	392.691
Manggarai Barat	361.863	414.102	471.145
Nagekeo	323.405	348.418	415.140
Sumba Barat Daya	313.598	379.046	428.710
Sumba Tengah	274.891	329.484	358.575
Manggarai Timur	379.992	419.929	505.437
Sabu Raiju	115.593	281.468	338.173

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 1.6 Pertumbuhan Belanja Daerah 2010-2011 & 2011-2012 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2010-2011	2011-2012
Lembata	20	8
Manggarai Timur	11	20
Manggarai Barat	14	14
Nagekeo	8	19
RoteNdao	12	7
Sumba Barat Daya	21	13
Sumba Tengah	20	9
Sabu Raiju	143	20

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU terhadap belanja seperti : Penelitian yang dilakukan oleh Gregorius N. Masdjojo & Sukartono (2009) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah serta *Flypaper Effect* pada Kab/Kota di Jawa Tengah dalam periode waktu 2006-2008. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Noni Puspita Sari & Idhar Yahya meneliti tentang pengaruh PAD, DAU terhadap Belanja Langsung pada pemerintahan Kab/Kota di propinsi Riau dalam periode waktu 2005-2008. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan PAD secara individual tidak mempengaruhi Belanja Langsung. Secara simultan DAU, PAD secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Namun berdasarkan argumen diatas yang dibangun oleh penulis, penelitian ini meneliti tentang pengaruh Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Umum yang diharapkan semakin rendah. Namun kenyataannya semakin tinggi, hal ini diduga disebabkan oleh konsumsi belanja yang terus naik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji Belanja Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk lebih memberi perhatian terhadap anggaran belanja daerah, penyusunannya serta pengendalian sehingga tujuan otonomi dapat tercapai yaitu berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

1.5 Keterbatasan

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan khusus menyangkut Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Umum pada delapan kabupaten di Propinsi NTT.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Umum pada delapan Kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun periode 2010-2012 dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan belanja daerah maka semakin tinggi pula penggunaan dana alokasinya, sehingga penelitian ini memperkuat rekomendasi kepada pemerintah agar memperkuat peraturan baik mengenai DAU dan pengawasan pengendalian pembelanjaan daerah.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu menjadi bahan revisi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel belanja daerah sebagai variabel independen terhadap Dana Alokasi Umum sebagai variabel dependen.

2. Jumlah sample sedikit, hanya pada propinsi NTT karena menggunakan daerah otonomi, sehingga sampel yang didapatkan hanya sedikit.

5.2.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat ditambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap DAU
2. Menggunakan sampel propinsi lain yang mempunyai daerah otonomi baru
3. Penelitian ini membuktikan bahwa belanja merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan DAU, sehingga pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan aspek belanja dalam penegakan undang-undang otonomi daerah dan menetapkan ketentuan belanja daerah yang rasional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga Pemerintah Daerah NTT dapat secara optimal mengelola potensi daerah yang pada akhirnya menarik investor untuk berinvestasi pada daerah demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTT

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Taufik. 2012. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011) Skripsi”*. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
- Bastian, Indra. 2005. *“Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar”*. Jakarta : Erlangga
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19”*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Harianto, David. 2007. *“Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita”*. Simposium Nasioanal Akuntansi X : Unhas Makassar 26-28 Juli 2007
- Mardiasmo, Drs. 2002. *“Akuntansi Sektor Publik”*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Masdjojo dan Sukartono. 2009. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008”*. TEMA Vol. 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32 -50.
- Sari Puspita dan Yahya. *“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di propinsi Riau”*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Nordiawan, Deddi. 2009. *“Akuntansi Sektor Publik”*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang*

Pemerintah Daerah. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
Jakarta*

Website Departemen Keuangan RI <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Website Info Korupsi www.infokorupsi.com

Website Tempo www.tempo.com

Website Tribun News www.tribunnews.com

© UKDW